

ABSTRACT

This study aims to examine empirically the influence of accountability of local government financial statements (audit opinion, internal control system, and non-compliance with the provisions of legislation) and the realization of regional expenditures on the level of local government corruption in Indonesia. This study uses secondary data derived from the audit results of the Republic of Indonesia Supreme Audit Agency for the 2015 and 2016 regional government financial reports of the KPK's annual report on corruption cases in the stage of investigation and prosecution of local governments in Indonesia.

The results of this study indicate that the accountability of the financial statements of the audit opinion area and the non-compliance with the key provisions: Accountability, Audit Opinion, Weaknesses of the Internal Control System, Non-compliance with the Rules of Legislation, Corruption, Regional Government. legislation does not affect the level of local government corruption in Indonesia. Whereas the internal control system and the realization of regional expenditure affect the level of local government corruption in Indonesia.

Keywords: *Accountability, Audit Opinion, Weaknesses of the Internal Control System, Non-compliance with the Rules of Legislation, Corruption, Local Government, Regional Expenditures*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah (opini audit, sistem pengendalian intern, dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan) dan realisasi belanja daerah terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2015 dan 2016 dari laporan tahunan KPK tentang kasus korupsi dalam tahap penyidikan dan penuntutan pemerintah daerah di Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah opini audit dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perKata kunci: Akuntabilitas, Opini Audit, Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Korupsi, Pemerintah Daerah. turan perundang-undangan tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia. Sedangkan sistem pengendalian intern dan realisasi belanja daerah berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia.

Kata kunci: Akuntabilitas, Opini Audit, Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Korupsi, Pemerintah Daerah, Belanja Daerah